

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat merupakan setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau rintangan dan hambatan bagi nya untuk melakukan selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Namun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 kata cacat yang di gunakan dalam undang-undang tersebut di perhalus menjadi kata disabilitas, dibuktikan dengan disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan pada saat melakukan interaksi dengan lingkungan serta sikapnya terhadap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Different Ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam penyebutan bagi penyandang disabilitas ada beberapa istilah yang di gunakan seperti Kementerian Sosial menyebut nya dengan penyandang cacat, kementerian pendidikan nasional menyebut nya dengan istilah berkebutuhan khusus dan kementerian Kesehatan menyebut nya dengan istilah penderita cacat.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dasar nya, guna mendapatkan pelayanan yang telah di berikan oleh pemerintahan sebagai penyediaan pelayanan dan Tidak membedakan atau non diskriminatif, karena pada hakikatnya dari pelayanan itu sendiri merupakan proses untuk pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung dan publik berbaikan dengan orang banyak bisa disebut juga dengan masyarakat.

Terdapat beberapa asas yang dapat memudahkan dalam aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas yang mutlak harus di penuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kemanusiaan, merupakan setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Asas Kegunaan, ialah semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
- c. Asas Keselamatan, merupakan setiap bangunan dalam satu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
- d. Asas Kemandirian, setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan orang lain.

Maka penyandang cacat atau disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, Pendidikan, kesempatan, dan kesamaan, kesamaan kesempatan dalam ketenaga kerjaan, bantuan sosial, rehabilitas, dan pemeliharaan taraf kesejah teraan sosial. Dimana dalam hal seperti ini yang di maksud dengan rehabilitasi sebagai berikut rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi pendidikan, dan rehabilitasi pelatihan

Menurut pasal 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di jelaskan bahwa:

- a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara,
- b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.
- c) Mewujudkan taraf kualitas kehidupan bagi penyandang disabilitas, agar menjadikan para penyandang disabilitas ini sejahtera secara lahir batin. Serta membentuk penyandang disabilitas ini agar mandiri,
- d) Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala Tindakan Diskriminatif, serta pelaksanaan hak asasi manusia, dan
- e) Memastikan pelayanan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang di milikinya untuk berperan serta berkontribusi secara optimal. Demikian juga segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas dasar kebutuhan dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan usaha penyelenggaraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di maksud adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Terkait penyandang disabilitas atau cacat ada beberapa hal yang dapat ditegaskan bahwasannya para penyandang disabilitas atau penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan.
- b. Pekerjaan dan kehidupan yang layak serta sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, Pendidikan dan kemampuannya.
- c. Perlakuan yang seimbang atau sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- e. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, rehabilitas, dan bantuan sosial.
- f. Dalam menumbuhkan kembangkan bakat memerlukan hak yang sama dalam kemampuan dan kehidupan sosial nya, terutama bagi penyandang cacat atau disabilitas dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penyandang disabilitas masuk ke dalam bagian masyarakat Indonesia yang berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama untuk meraih dan memperoleh Pendidikan untuk belajar, memiliki hak untuk kehidupan yang layak, dan mempunyai kemampuan dalam berkarya, menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai jual untuk di pasarkan. Namun realitanya pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka dan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurang nya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitas, kurang nya fasilitas umum pada bangunan umum atau bangunan pemerintahan yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas. serta ketersediaan fasilitas khusus seperti alat-alat bantu Kesehatan bagi penyandang disabilitas yang masih terlibat minimal dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan pentingnya fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang

disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta menunjukan kaum disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat.

Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah Negara. Pemerintahan dapat dikatakan juga sebagai wadah sebuah aspirasi atau sebagai tempat yang dapat menampung segala keluhan kesah masyarakat. Sampai nanti nya akan dibentuk semacam kebijakan atau peraturan-peraturan yang berguna untuk menjadi solusi dari keluhan atau permasalahan yang dialami masyarakat.

Kalau digambarkan pemerintah dapat dikatakan sebagai orang yang mengeluarkan suatu peraturan atau kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintahan, lalu diterapkan dan dikeluarkan peraturan atau kebijakan tersebut oleh pemerintah, dan dilaksanakan oleh masyarakat suatu peraturan atau kebijakan yang telah di bentuk pemerintah, dengan maksud dan tujuan untuk membuat perubahan yang lebih baik.

Dalam menyikapi permasalahan mengenai penyandang disabilitas ini pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dinas saerah dan keputusan walikota Nomor 48 Tahun 2009 tentang tugas, fungsi dan tata kerja serta rincian tugas jabatan pada dinas sosial yang berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah yang di pimpin oleh kepala dinas.

Bahwa Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dimana didalam Dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluai Sekretaris daerah. Dan Dinas Sosial juga memiliki tugas untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang sosial.

Dalam Dinas Sosial terdapat Bidang Rehabilitasi Sosial dimana pada Bidang Rehabilitasi Sosial terdapat beberapa seksi-seksi sosial yaitu seperti: Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial. Dalam hal ini Seksi Rehabilitasi sosial yang dibahas merupakan seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Rehabilitasi merupakan suatu proses *refungsionalisasi* dan pengembangan untuk memungkinkan penderitaan cacat mampu melakukan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. sedangkan menurut Soewito ialah segala upaya, baik dalam

bidang Kesehatan, kejiwaan, sosial, Pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya yang dikoordinir menjadi *continuous process* yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmani maupun rohani, untuk menduduki Kembali tempat dimasyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat (rehabilitasi penderita cacat). Sedangkan menurut Zulaikhah (1994) mengatakan bahwa rehabilitasi sosial merupakan segala Tindakan fisik, penyesuaian psikologis dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial dan vokasional bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan pengertian atau penjelasan mengenai rehabilitasi sosial di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari rehabilitasi sosial untuk memulihkan Kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masadepan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memulihkan Kembali kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dapat dilihat pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam Seksi Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas memiliki tim khusus lapangan yang bertugas dan memiliki tujuan untuk mengawasi dan menyerap informasi yang mereka terima dari keadaan lapangan mengenai yayasan penyandang disabilitas di kabupaten Bekasi, dimana tim khusus tersebut dinamakan pendamping lapangan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 8 (Delapan) orang dan menyebar di Kabupaten Bekasi.

Dengan banyaknya jumlah Penyandang Disabilitas fisik maupun mental di Indonesia dapat menjadikan setiap daerah untuk memberikan pemberdayaan kepada para penyandang disabilitas fisik. Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas fisik dan mental sangat penting, sehingga sangat memerlukan perhatian dari berbagai kalangan. Dan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam penanganan penyandang disabilitas fisik maupun mental merupakan pemerintahan daerah yaitu Dinas Sosial.

Pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019 yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dapat dilihat Pada table Berikut:

Tabel 1. 1**Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bekasi 2019**

Disabilitas Mental	Disabilitas Fisik	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik	Jumlah
500	60	30	40	630

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2019

Berdasarkan table di atas Jumlah Penyandang Disabilitas tahun 2019 di Kabupaten Bekasi berjumlah 630, dengan macam-macam kategori penyandang disabilitas tersebut, tentunya Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memberikan perhatian dan penanganannya untuk penyandang disabilitas salah satu perhatian dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Bekasi berupa pelatihan terhadap penyandang disabilitas dan menyalurkan bantuan berupa sembako dan alat bantu serta motivasi. Bentuk pelatihan yang telah dilakukan seperti pelatihan menjahit, pelatihan nyablon, pelatihan pertukangan, pelatihan huruf Braille (Huruf Braille merupakan sistem penulisan yang digunakan oleh penyandang tuna Netra atau orang yang penglihatannya rendah) dan pelatihan lain-lainnya. Pelatihan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk meringankan beban mereka dalam mencapai kesejahteraannya, dan tujuan dari pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi agar tidak terlantar dan turun ke jalanan.

Dinas sosial kabupaten Bekasi menjadi wadah atau tempat berbagi permasalahan yang dihadapi oleh yayasan-yayasan penyandang disabilitas khusus nya seksi rehabilitasi sosial yang menangani dibagian penyandang disabilitas yang mengurus dan menangani yayasan-yayasan penyandang disabilitas, dapat dilihat yayasan penyandang disabilitas yang berada di kabupaten Bekasi.

Tabel 1. 2**Yayasan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bekasi 2022**

No	Yayasan	Alamat	Jenis Disabilitas	Jumlah Binaan	Tahun Pembinaan
1	Cahaya Mulya	Kp. Nanggewer RT 002 RW 002, Lanbansari, Kec. Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17540.	Tuna Daksa	60	2018
2	Al-Fajar	Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510	Mental	500	2018
3	Kawan Sejahterah	Jl. Buwek Raya, RT 001 RW 002, Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510	Tuna Daksa	40	2020
4	Anugrah Kasih	Jl. Jend. Urip sumoharjo, Tanjungbaru, kec. Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530	Mental	30	2019

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi 2022

Berdasarkan tabel 1.2 di atas bahwa Kabupaten Bekasi memiliki yayasan untuk para penyandang disabilitas, yayasan yang terdapat di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi Dua kategori yaitu dengan binaan luar dan binaan dalam. Yang dimaksud dengan binaan luar merupakan para penyandang disabilitas yang dibina oleh yayasan tetapi tidak tinggal menetap didalam yayasan tersebut, sedangkan kalau binaan dalam merupakan para penyandang disabilitas yang dibina oleh yayasan dan tinggal menetap di dalam yayasan tersebut. Pada Kabupaten Bekasi yayasan yang masuk binaan luar yaitu yayasan Cahya Mulya dengan 60 binaan luar dan yayasan Kawan Sejahtera dengan 40 binaan luar, sedangkan untuk yayasan bina dalam terdiri dari yayasan Al-Fajar dengan 500 binaan dalam dan yayasan Anugrah Kasih dengan 30 binaan dalam. Yayasan penyandang disabilitas memiliki manfaat yang cukup banyak untuk penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas dapat mengikuti kegiatan pembinaan seperti kegiatan keterampilan, dan motivasi-motivasi yang diberikan untuk para penyandang dengan tujuan dari kegiatan pendampingan tersebut agar para penyandang disabilitas dapat melakukan kegiatan yang positif, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mandiri, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pelatihan keterampilan yang telah diajarkan oleh Pembina, kegiatan pembinaan itu sendiri seperti pelatihan menjahit,

pelatihan menyablon, pelatihan computer, pelatihan tata boga, pelatihan pembangunan, dan pelatihan kreatifitas seperti membuat masker, kerajinan kotak tisu, membatik dan lain-lainnya. Dimana kegiatan pembinaan tersebut merupakan program dari Seksi Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk para penyandang disabilitas dengan tujuan agar para penyandang disabilitas memiliki keahlian dan kemandirian demi kesejahteraan penyandang disabilitas itu sendiri, agar para penyandang disabilitas dapat bertanggung jawab kepada kebutuhan sehari-harinya.

Selama ini dalam urusan kebijakan-kebijakan yang menyangkut aksesibilitas para penyandang disabilitas (*disabled persons*) pada tempat-tempat pelayanan umum yang ada di Indonesia, tampaknya Sebagian besar masih sebatas wacana. Padahal kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pasal 1 (ayat 3) dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, khususnya pasal 1 (ayat 1) dengan tegas dinyatakan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan” sebagaimana warga masyarakat lainnya.

Kebijakan pemerintah menyangkut pekerja sosial (*Social Works*) sangat dibutuhkan dalam partisipasinya, baik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, mewakili lembaga maupun instansi pelayanan sosial karena memang profesinya sebagai selaku pekerja sosial, tentunya dalam pembinaan kline sudah harus memiliki bekal yang cukup dan mampu mengatasi pembinaan tersebut, hal ini sangat penting karena sering kejadian kalau penyandang disabilitas yang turun kejalanan kemudian berprofesi sebagai pengemis itu tidak mutlak hanya karena kesalahan pemerintahan.

Pola pembinaan merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam membantu mengembalikan fungsi sosial bagi penyandang disabilitas sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas yang telah ditempuh melalui beberapa kegiatan pelayanan bimbingan, baik melalui sistem panti maupun non panti. Pembinaan dilakukan agar mengetahui dan mendeskripsikan tentang kebutuhan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, maka dengan diketahuinya kebutuhan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas secara jelas maka dapat dilakukan rehabilitasi sosial secara optimal, sehingga para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Masalah yang diterima yayasan dalam menangani pengelolaan yayasan dan pembinaan penyandang disabilitas, didasari oleh kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Kabupaten Bekasi terhadap yayasan, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang berada pada yayasan tidak sesuai, karena minimnya pengurus yayasan Al-Fajar yang ahli dalam bidangnya. Sehingga membuat pembinaan menjadi kacau dan lambat untuk ditangani.

Sebagaimana diperkuat wawancara kepada bapak H. Marsan Susanto, selaku Ketua yayasan Al-fajar Berseri, Disabilitas Mental di kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, beliau menyatakan:

“pelayanan tidak sesuai dengan yang dilayani, pelayanan yang dimaksud itu orang yang melayani atau merawat lah ya, bayangkan 90 pasien orang dalam gangguan jiwa biasa disebut ODGJ yang ngerawat 3 orang bayangkan saja harus pandani-pandai kita memperdayakan mereka yang sekian persen sudah sembuh untuk bisa melakukan aktivitas seperti ngepel, kaya ngisi air galon minum kan artinya melayani tenaga, tetapi kalau melayani mereka belum bisa kaya memberikan makan temen nya belum bisa, makein bajunya belum bisa”

2. Kurangnya pembinaan yayasan penyandang diabilitas seperti pembinaan kreativitas dan kemandirian sehinga berdampak kepada binaan yayasan penyandang disabilitas menjadi tidak ada kegiatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian seperti menjahit, nyablon, tata boga dan Pembangunan yang biasa nya diadakan 1 tahun sekali, semenjak pandemi di tiadakan.
3. Bangunan yang belum ramah bagi penyandang disabilitas.bangunan dinas soaial yang sulit dan berbahaya untuk dilalui bagi para penyandnag disabilitas, dan pada saat melakukan pembinaan dilakukan di bangunan atau Gedung yang belum memiliki standar penyandang disabilitas sehingga menjadi kendala bagi penyandang disabilitas yang mengikuti pembinaan.

Sebagaimana diperkuat wawancara dengan bapak Subroto, selaku ketua yayasan Cahya Mulya Tuna Daksa di kabupaten Bekasi, pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 10.32 WIB, beliau menyatakan:

“bagi kami para divabel ini bisa dibilang memiliki kekurangan di salah satu bagian tubuh kami, yang tidak seperti manusia normal lainnya yang bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah, tetapi kami memiliki keterbatasan fisik, tentunya sangat sulit untuk melakukan aktifitas diluar karena tidak semua bangunan yang memiliki akses khusus untuk orang-

orang seperti kami ini, contoh terdekat kaya bangunan dinas sosial akses untuk masuk kedalam gedung itu cukup curam untuk kami, dan beberapa kali pada saat mengikuti pembinaan seperti menjahit dan menyablon itu kami mengalami kendala terkait bangunan yang tidak memiliki life sehingga beberapa teman divabel yang memiliki kekurangan atau cacat di bagian kaki cukup kesulitan untuk melakukan kegiatan pembinaan tersebut”

Sebagaimana diperkuat wawancara kepada bapak Ali. Imron S.Ap, selaku Penyuluh Ahli Muda atau Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 13.30 WIB, beliau menyatakan:

“benar adanya tentang bangunan yang belum memadai bagi para penyandang disabilitas kaya bangunan kita ini dinas sosial sendiri belum memiliki standar bangunan bagi para penyandang disabilitas, mungkin karena bangunan lama kali ya kalo bangunan baru kaya pengadilan itu udah ada standar bagi penyandang disabilitas. terus ada beberapa bangunan yang kita gunakan untuk pembinaan yayasan penyandang disabilitas yang belkum memiliki standar bagi penyandang disabilitas juga, kaya waktu itu kita ngadai pembinaan nyablon dan pembinaan menjait terjadi kendala soalnya bangunan nya tidak ramah untuk mereka yang mengikuti pembinaan tersebut”

4. Sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, baik disabilitas mental ataupun disabilitas fisik.

Sebagaimana diperkuat wawancara dengan bapak H. Marsan Susanto, selaku ketua yayasan Al-fajar Berseri disabilitas mental di kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2023, pukul 10.00, beliau menyatakan:

“kalau saya mah belum ada sama sekali, ini pernah ikut pelatihan juga kita pernah ikut pelatihannya diundang termaksud Perusahaan, orang-orang Perusahaan supaya Perusahaan ini nanti Ketika dapat rekomendasi dari dinas sosial untuk binaan-binaan yang sembuhnya sudah sekianpersen dinyatakan sehat bisa diterima oleh perusahaan, nah diundangkan itu Perusahaan-perusahaan semua datang ke pemda itu dulu udah ada tapi emang sampai saat ini realisasinya belum ada, ga tau kali kalo misalnya yayasan-yayasan lainnya mah kali ya bukan odgj yayasan disabilitas mental maksudnya. Kalau odgj itu kita memang belum pernah disalurkan dan menyalurkan kitakan dari tahun 2012 artinya udah 21 tahun bermitra belum ada dari pihak dinas sosial pak marsan saya minta binaannya untuk disalurkan atau mungkin binaan saya mau kerja saya ngomong ke pihak dinas, dari sana mungkin jug atidka berani juga yak arena yang tadi saya ceritakan kan kalo bekas odgj bisa saja Perusahaan tidak menerima barang kali gitu atau juga mungkin dinsosnya belum ada Upaya nya saja hanya program rencananya saja gitu, untuk saat ini belum ada binaan saya

yang sudah sehat dapat fasilitas bekerja diperusahaan, sampai saat ini mungkin yayasan-yayasan lainnya sudah ada yang mendapatkan kali ya, kalau dari saya yayasan mental belum ada”

Adapun permasalahan tersebut diduga karena adanya beberapa faktor yaitu:

1. Keterbatasan tenaga pendamping, tenaga pendamping yang dimiliki seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, ada 8 orang yang menyebar di wilayah kabupaten Bekasi.

Sebagaimana diperkuat wawancara kepada bapak M. Sulaeman, selaku Pendamping Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 29 Juli 2023, pukul 09.35 WIB, beliau menyatakan:

“pendamping penyandang disabilitas di kabupaten Bekasi pada saat ini ada 8 pendamping penyandang disabilitas, sebetulnya sangat amat kurang untuk wilayah kabupaten Bekasi itu sendiri, soalnya kan wilayah kabupaten Bekasi ini luas kalau cuma 8 pendamping saja 1 orang bisa memegang dua sampai tiga wilayah sekaligus dan itu kurang efektif, idealnya pendamping yang dibutuhkan 23 orang agar masing-masing pendamping bisa memegang 1 wilayah atau kecamatan”

2. Anggaran yang terbatas, dalam menjalankan program-program dan melaksanakan pembinaan atau pelatihan memerlukan biaya karena biaya yang terbatas sehingga dapat mempengaruhi pada pelaksanaan pembinaan tersebut.

Sebagaimana diperlukan wawancara kepada Bapak Ali. Imron S. Ap, selaku Penyuluh Ahli Muda atau Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 13.30 WIB, beliau menyatakan:

“Kalau untuk anggarannya sih fleksibel sesuai dengan kemauan disamping mereka itu harus ada yang diberikan kepada kita mengadakan kegiatan tersebut, seperti menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan dan pembinaannya contoh seperti menyablon semua kita kasih, jadi kalau untuk anggaran kita sesuaikan jadi tidak tetap dan menentu tergantung kemampuan dari pemda aja Contoh nya Seperti pada tahun 2019 yayasan mengajukan untuk pembinaan menyablon untuk 100 orang tetapi pada saat anggaran turun dan diterima hanya mampu untuk 50 orang.”

3. Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas telah memiliki Kerjasama terhadap perusahaan untuk menyalurkan para penyandang disabilitas yang sudah mampu dan siap terjun ke dunia pekerjaan, tetapi seksi rehabilitasi sosial hanya menyalurkan berkas-berkas saja karena untuk tes dan penyeleksian akan di lakukan oleh orang perusahaan yang mengetahui kriteria yang pas untuk perusahaan.

Sebagaimana diperkuat wawancara dengan bapak Ali. Imron, selaku Penyuluh Ahli Muda atau Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial kabupaten Bekasi, pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 13.30, beliau menyatakan:

“kita ada Kerjasama dengan perusahaan tetapi pada saat penyeleksian pihak Perusahaan yang menyeleksi langsung. Kita hanya menyalurkan saja seperti contohnya sudah banyak yang mengajukan ke Hyundai kita tamping dan nanti kita serahkan ke Perusahaan, tetapi nanti yang menyeleksi perusahaannya sendiri, kita sebagai yang menyalurkan saja hanya bisa sampai situ, karena nanti Keputusan yang diterima atau tidak berdasarkan kriteria dari Perusahaan, karena Perusahaan yang menyeleksinya. Pada tahun 2019 ada 13 orang para penyandang disabilitas yang diterima bekerja di Alfamart dan 1 orang penyandang disabilitas yang bekerja di Kejaksaan, pada tahun ini 18 orang mengajukan pendaftaran dan 8 orang penyandang disabilitas sedang melakukan tes.”

Adanya beberapa masalah tersebut mendorong penulis untuk meneliti apakah seksi rehabilitasi Dinas Sosial dalam pembinaan yayasan penyandang disabilitas di kabupaten Bekasi sudah melakukan pembinaan yayasan penyandang disabilitas dengan baik atau belum. Harapan penulis juga dimaksudkan untuk melihat permasalahan yang telah diuraikan dan mengingat betapa pentingnya kinerja seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial kabupaten Bekasi karena sangat dibutuhkan yayasan-yayasan penyandang disabilitas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, mendalam dan memahami dengan judul.

“Kinerja Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Yayasan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bekasi”

1. 2 Perumusan masalah

- a. Bagaimana kinerja seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam pembinaan yayasan penyandang disabilitas?
- b. Apakah faktor hambatan Kinerja Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Yayasan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bekasi?

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kinerja seksi rehabilitasi sosial dalam pembinaan yayasan penyandang disabilitas kabupaten bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan tentunya memiliki tujuan akhir, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap yayasan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi.
3. Agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam melakukan pembinaan bagi yayasan penyandang disabilitas

1.4 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka signifikasi pada penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu signifikasi akademi dan signifikasi praktis.

1.4.1. Signifikasi Akademik

Dalam penulisan penelitian ini saya menemukan beberapa referensi atau beberapa penelitian yang juga membahas terkait penyandang disabilitas. Jumlah Pustaka yang menjadi rujukan sebanyak 10. Untuk penelitian pertama, peneliti ditulis oleh **Suhaila Haryati, Maulana Andi Surya** program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan judul **Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, studi Pustaka, observasi dan dokumentasi Teknik triangulasi data sumber digunakan sebagai Teknik keabsahan data. Terbukti dengan adanya penelitian ini dapat menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di mana fasilitatif sudah berperan dengan cukup baik, walaupun sudah cukup baik tetapi hal tersebut belum secara maksimal. Mengapa dapat dikatakan belum maksimal? Karena dapat dilihat dari pelatihan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintahan ternyata belum merata, dimana masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan pelatihan tersebut, maka dengan begitu sangat perlu

dilakukan evaluasi terhadap peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas agar pelatihan dan kegiatan yang lain nya dapat di rasakan secara merata.

Penelitian ke dua, penelitian ini ditulis oleh **Theresia Baturangka, Johannis Kaawoan, Frans Singkoh** Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Dengan judul **Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas**, Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat paham akan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. maka penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya dengan didasarkan kepada kesamaan hak. Dapat kita lihat berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 42 bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat, fisik dan/atau, cacat mental berhak memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara untuk menjamin suatu kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan nya, agar dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun dalam kenyataannya bahwa kondisi tersebut malah sebaliknya, nyatanya pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, maka dari itu Pemerintah (Dinas Sosial) memiliki peran sebagai perangkat daerah yang memiliki lingkungan tugas untuk melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas. maka inti dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana peran dinas sosial kota manado dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat penyandang disabilitas. maka dalam penelitian ini membuahkan hasil dengan menunjukan bahwa peran Dinas Sosial Kota Manado dalam melakukan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas berupa peran edukasi, peran fasilitatif, dan peran teknis yang sudah berperan cukup baik walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pelatihan dan bantuan sosial yang di berikan belum merata, dimana masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pemberdayaan, maka dari itu di perlukan evaluasi terhadap peran dinas sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.

Penelitian ke tiga, penelitian ini ditulis oleh **Suhadi, Ayu Riani**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, dengan judul **Pemenuhan Hak Penyandang**

Disabilitas Fisik Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kota Balikpapan. Tujuan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan di Kota Balikpapan, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu sebesar 1% untuk swasta dan 2% untuk pemerintahan, namun sampai saat ini kuota yang di berikan belum terpenuhi, sehingga pemerintah masih mengupayakan agar dapat memenuhi minimal kuota tersebut dengan melakukan Kerjasama dengan perusahaan, dimana mendorong perusahaan-perusahaan di Kota Balikpapan untuk menyiapkan sarana dan prasarana penunjang, meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan guna meningkatkan kemampuan, dan merubah polapikir masyarakat dan perusahaan terhadap penyandang disabilitas sebagai kelompok atau golongan orang yang memerlukan belas kasihan.

Penelitian ke empat, penelitian ini ditulis oleh **Tesalonika Putri Manopo, Frans Singkoh, Ventje Kasenda**, dengan judul **Pemberdayaan Kelompok Penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langgowan Timur)**, program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur terhadap pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas, metode yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Longowan Timur dapat di simpulkan bahwa pemerintah kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam memberdayakan penyandang disabilitas atau membantu pengembangan para penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kabupaten Minahasa telah berupaya semaksimal mungkin dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas yang ada dalam hal membantu mereka secara sosial agar para penyandang disabilitas bisa mandiri.

Penelitian ke lima, penelitian ini ditulis oleh, **Pangesti, Shinta Maulidya**, Universitas Jenderal Soedirman, dengan judul **Pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus (Study Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Fisik di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran Banyumas)**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan, dan menjelaskan tentang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas fisik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas fisik di Linggasari Kembaran, Banyumas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif sehingga penulis dapat memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan tujuan

penelitian. Dimana data yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara Kepala Desa Linggasari, Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasari, Ketua RT 02 RW 04, Ketua RT 02 RW 02, Penduduk RT 03 RW 05, dan Penyandang Disabilitas. data juga di peroleh dengan melakukan observasi dengan cara mengamati kondisi rumah penyandang disabilitas yang sederhana, lingkungan sekitar yang menerima keberdayaannya, interaksi dengan masyarakat umum terlaksana dengan baik dan mengikut sertakan penyandang disabilitas dengan kegiatan didalam lingkungan masyarakat.

Penelitian ke Enam, penelitian ini ditulis oleh, **Aprilian Windy Anggara**. Program studi Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dengan judul **Sistem Informasi Pendataan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Aceh**, penelitian ini bertujuan untuk proses pendataan bantuan alat disabilitas dengan menggunakan sistem berbasis online lebih mudah di lakukan karena di dukung dengan pelaporan khusus bagi bantuan alat disabilitas dan aplikasi. Sedangkan kesatuan suatu pekerjaan baik dalam instansi pemerintahan maupun instansi non pemerintahan, salah satu instansi yang hanya memanfaatkan sistem informasi secara manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft word dan excel pada pendataannya dilakukan Dinas Sosial Aceh, yang menyangkut dengan sistem informasi pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang mengakibatkan proses pembuatan laporan menjadi terlambat karena harus membuka banyak folder dan file-file untuk mengumpulkan data-data sesuai dengan bentuk laporan yang diinginkan pimpinan. Maka yang menjadi tujuan dari penulisan yaitu untuk mengetahui dan merancang sistem informasi pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Aceh dengan menggunakan Bahasa pemrograman berbasis web.

Peneliti ke Tujuh, peneliti ini di tulis oleh **Aisyah Yulia**, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (SMH), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, dengan judul **Layanan Rehabilitasi Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Serang)**, kecacatan mental atau fisik terkadang membuat orang yang mengalaminya terkadang merasa kurang beruntung dan membentuk pribadi yang merasa rendah diri, pandangan kasihan yang diberikan orang sekitar bisa membentuk karakter penyandang disabilitas kurang percaya diri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan rehabilitasi serta kewajiban negara dalam memberikan Pendidikan, pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, Kementerian sosial melalui Dinas Sosial mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan rehabilitasi kepada para penyandang disabilitas.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus dan Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kondisi penyandang disabilitas sebelum mendapatkan layanan rehabilitasi sosial merasa rendah diri dan menutup diri. Tahapan untuk melakukan rehabilitasi juga cukup Panjang mulai dari pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman, penyusunan perencanaan, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, hingga bimbingan lanjut. Bentuk layanan rehabilitasi yang diberikan juga beragam seperti, pemberian alat bantu, bantuan sosial, asistensi penyandang disabilitas berat, pelatihan keterampilan serta pemberian alat modal usaha. Manfaat dan layanan rehabilitasi sosial juga dirasakan cukup baik bisa dilihat dari penyandang yang sudah direhabilitasi bisa meningkatkan kemandirian, terpenuhinya hak dasar, merubah pola pikir, mendapatkan keterampilan.

Penelitian ke Delapan, penelitian ini ditulis oleh **Fitria Reskiawati**, UIN Alauddin Makassar, Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan Judul **Pola Pembinaan Penyandang Disabilitas Tubuh Pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar, untuk mengetahui bagaimana metode pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada panti sosial bina daksa wirajaya makasar, dan juga untuk mengetahui apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada sosial bina daksa wirajaya makasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan sosiologi dan komunikasi, selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa foto-foto peristiwa pembinaan penyandang disabilitas tubuh, lalu Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada panti sosial bina daksa wirajaya Makassar melalui pendekatan awal, assessment, rencana intervensi sosial, rehabilitasi sosial, bimbingan resosialisasi, intervensi, terminasi, dan bimbingan lanjutan. Adapun metode pembinaan penyandang disabilitas tubuh dengan cara pembinaan individu dan kelompok. Dan ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pada panti sosial bina daksa Wijaya Makassar dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyandang disabilitas. faktor penunjang berupa fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, SDM yang

terlatih, dukungan dari beberapa pihak terkait. Sedangkan factor penghambatnya berupa perbedaan latar belakang Pendidikan dan intelektual, penerima manfaat tidak serentak masuk di PSBDW Makasar, dan factor etika atau psikologi.

Penelitian ke Sembilan, penelitian ini ditulis oleh **Anggraini, Rini**, Universitas Muhammadiyah Jember, dengan judul **Implementasi program Pembinaan Penyandang Cacat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Jember)**. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi program pembinaan penyandang disabilitas (studi kasus pada dinas sosial jember). Disabilitas yang memiliki hak untuk kehidupan yang layak, oleh karena itu Dinas Sosial berperan sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan penyandang disabilitas, pada faktanya dengan kondisi fisik yang tidak sama dengan manusia lain atau berbeda dari manusia lain nya penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat. pemerintah daerah memerlukan solusi permasalahan penyandang disabilitas, maka dari itu Dinas Sosial memiliki program pembinaan penyandang cacat atau disabilitas, kaum disabilitas bisa diberdayakan dan di rehabilitasi melalui program tersebut. Penelitian ini di fokuskan pada implementasi program pembinaan penyandang cacat, dimana peneliti menguraikan implementasi dan kendala dari program tersebut, didasari oleh hukum yang tepat dan kebijakan yang jelas. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, lalu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen, sedangkan analisis data menggunakan analisis data interaktif yang meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan concluding drawing atau verification.

Penelitian ke Sepuluh, penelitian ini ditulis oleh **Ni Made Estiyanti, Putu Sri Adelia Pratiwi, Ni Kadek Adi Istriawati, Anak Agung Ayu Putri Ardiyanti**, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, dengan judul **Pembinaan Soft Skill dan Hard Skill Penyandang Disabilitas Pada Yayasan Puspadi Bali**. Penelitian ini bertujuan untuk melatih kemampuan penyandang disabilitas dengan kegiatan yang akan dilakukan berupa kegiatan pelatihan keterampilan dasar komputer yaitu program Microsoft word dan program Microsoft excel serta pelatihan kewirausahaan berupa pelatihan penggunaan media sosial marketing dengan harapan penyandang disabilitas mempunyai peningkatan kemampuan keterampilan komputer dan kewirausahaan. Oleh sebab itu dengan ada nya program atau kegiatan tersebut dapat membuat kemampuan para penyandang disabilitas meningkat dalam kemampuan pengoprasian Microsoft word dan excel serta pembuatan dan pengolahan akun sosial media berupa Instagram dan Facebook untuk media sosial *marketing*. Dalam program kemandirian masyarakat ini

dibantu oleh rekan Yayasan Puspadi Bali yang berkedudukan di kantor Annika Linden Centre Jalan Bakung No 19 Denpasar Timur.

Tabel 1. 3
Signifikasi Penelitian

No	Jurnal	Penelitian	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1	Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai	Suhaila Haryati dan Maulana Andi Surya	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.	Persamaan: Membahas pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas Perbedaan: Terletak pada wilayah yang di teliti berbeda dan teori yang di gunakan berbeda.
2	Peran Dinas Sosial Kota manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas	Theresia Baturangka dan Johannis Kaaoan dan Frans Singkoh	Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat paham akan pemberdayaan penyandang disabilitas yang di lakukan oleh pemerintah dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.	Persamaan: Membahas tentang pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas Perbedaan: Wilayah penelitian dan teori yang di gunakan berbeda
3	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kota Balikpapan	Suhadi dan Ayu Rini	Penelitian ini bertujuan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan di kota Balikpapan	Persamaan: Membahas pemberdayaan Masyarakat penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak
4	Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilita Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Kecamatan Langgowan Timur)	Tesalonika Putri Manopo dan Frans Singkoh dan Ventje Kasendra	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langgowan Timur terdapat pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas	Persamaan: Membahas pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas Perbedaan: Wilayah penelitian dan teori yang digunakan berbeda
5	Pemberdayaan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Studi Tentang Upaya	Pangesti dan Shintia Maulidya	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan dan	Persamaan: Membahas pemberdayaan

	Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas fisik di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran Banyumas)		menjelaskan tentang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas fisik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di linggasari banyumas	masyarakat penyandang disabilitas Perbedaan: Wilayah penelitian dan teori yang digunakan
6	Sistem Informasi Pendataan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Aceh.	Aprilian Windy Anggara	Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas, dengan merancang sistem informasi pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Aceh dengan menggunakan Bahasa pemrograman berbasis web.	Persamaan: Membahas penyandang disabilitas Perbedaan: Wilayah penelitian dan teori yang digunakan
7	Layanan Rehabilitasi Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Serang)	Aisyah Yulia	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi psikis penyandang disabilitas sebelum mendapatkan rehabilitasi sosial dinas serang, dan untuk mengetahui tahapan dan bentuk layanan rehabilitasi penyandang disabilitas.	Persamaan: Membahas penyandang disabilitas Perbedaan: Wilayah tempat penelitian dan teori yang digunakan berbeda.
8	Pola Pembinaan Penyandang Disabilitas Tubuh Pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar	Fitria Reskiawati	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan penyandang disabilitas tubuh pada panti sosial bina daksa wirajaya makasar melalui pendekatan awal, assesmen, rencana intervensi sosial, rehabilitasi sosial, sosialisasi, intervensi, terminasi dan bimbingan lanjutan. Pembinaan yang dilakukan oleh PSBDW Makasar dengan cara individu dan kelompok	Persamaan: Pembinaan Penyandang Disabilitas Perbedaan: Wilayah tempat penelitian dan teori yang digunakan.

9	Implementasi Program Pembinaan Penyandang Cacat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Jember)	Anggraini, Rini	Tujuan dari penelitian ini dimana peneliti menguraikan kendala dari program tersebut yang berdasarkan pada hukum yang tepat dan kebijakan yang jelas, untuk memberdayakan disabilitas dalam implementasi program pembinaan penyandang cacat diharapkan dapat memecahkan segala permasalahan bagi kaum disabilitas, memenuhi kebutuhan dan mereka bisa hidup mandiri serta layak dalam bermasyarakat.	Persamaan: Pembinaan penyandang cacat Perbedaan: Wilayah tempay penelitian dan teori yang di gunakan.
10	Pembinaan Soft Skill Dan Hard Skill Penyandang Disabilitas Pada Yayasan Puspadi Bali.	Estiyanti, N. M Pratiwi, P. S. A. Istriawati, N. K. A. & Ardyanti, A.A.A.P.	Tujuan dari penelitian ini merupakan pelatihan dimana kegiatan yang akan dilakukan berupa kegiatan pelatihan keterampilan dasar komputer yaitu program Microsoft Word dan program Microsoft excel serta pelatihan kewirausahaan berupa pelatihan penggunaan media sosial marketing dengan harapan penyandang disabilitas mempunyai peningkatan kemampuan keterampilan komputer dan kewirausahaan. Hasil kegiatan berupa peningkatan kemampuan pengoperasian Microsoft word dan excel serta pembuatan dan pengelolaan akun media sosial berupa Instagram dan Facebook untuk media sosial marketing.	Persamaan: Pembinaan penyandang disabilitas Perbedaan: Wilayah tempat penelitian dan teori yang di gunakan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

1.4.2. Signifikasi Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam “45” Bekasi guna memperoleh gelar sarjana social. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam dunia pekerjaan terlebih di bidang pemerintahan

b. Bagi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi peran pemerintah dalam menangani Disabilitas di Kabupaten Bekasi dan sebagai masukan melalui rekomendasi dan saran untuk perkembangan dan kemajuan.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan sistematis maka peneliti membuat sistematika penulisan dengan membagi nya dalam 5 bab, sistem matika yang peneliti maksud yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

pada bagian ini mengurai tentang gambaran umum penelitian, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian (akademik dan praktis) dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Pada bagian ini menguraikan tentang perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi pemikiran yang berkaitan dengan penanganan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang paradigma, metode, dan desain penelitian, sumber, Teknik pengolahan data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian (uji keabsahan data), tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di lakukan, dalam bab ini juga terdapat rekomendasi serta saran-saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dan saran untuk lokasi yang menjadi objek penelitian.